

**KETERLIBATAN WARGA DALAM PENGEMBANGAN KELURAHAN
KLABLIM: PERSPEKTIF CIVIC PARTICIPATION**

SKRIPSI



**OLEH:
ANITA OROSOMNA
148720520024**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA SOSIAL DAN OLAAHRAGA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KETERLIBATAN WARGA DALAM PENGEMBANGAN KELURAHAN KLABLIM:
PERSPEKTIF *CIVIC PARTICIPATION***

ANITA OROSOMNA

148720520024

Telah di setujui tim pembimbing

Pada tanggal 07, 03, 2025

Pembimbing I

Dr. Budi Santoso, M.Pd.

NIDN 1406029201


.....

Pembimbing II

Ihsan, S. Pd., M. Pd.

NIDN 1419108901


.....

LEMBAR PENGESAHAN
KETERLIBATAN WARGA DALAM PENGEMBANGAN KELUARAHAAN
KLASAMAN: PERSPEKTIF CIVIC PARTICIPATION

ANITA OROSOMNA
148720520024

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Bahasa Sosial dan Olahraga
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada:2025

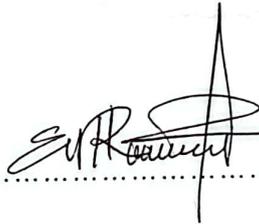
Dekan Fabio



Rom Andri Pramita, M.Pd.
NIDN. 1411129001

Tim Penguji Skripsi

1. Ernawati Simatupang, M.Pd.
NIDN. 1409099601

()

2. Lestari, M.Pd.
NIDN. 1402118401

()

3. Ihsan, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 14189108901

( 4/5 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang Pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka

Sorong, Maret, 2025

Yang membuat pernyataan,



Anita Orosomna

Nim : 148720520024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kemalasan adalah Faktor Dari Sebuah Kegagalan

Maka Kegagalan Terjadi Karena

Terlalu Banyak Berencana Tapi Sedikit Berpikir.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang Tuaku tercinta, Adik, Kakak, dan Sahabat-sahabat terimakasih atas dukungan doa dan moril selama penulis menempuh pendidikan mulai dari awal sampai pada akhir
2. Bapak Dr. Budi Santoso, M.Pd. sebagai pembimbing I Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dan Bapak Ihsan M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengerahkan penulis dalam menulis dan penyusunan Skripsi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bertambah ilmunya dan berkah
3. Almamater tercinta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkah dan rahmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan proposal ini tepat pada waktu.

Proposal yang berjudul: “Keterlibatan Warga dalam Pengembangan Kelurahan Klabilim: Perspektif *Civic Participation*” ini disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk menyelesaikan perkuliahan guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Dalam menyusun Proposal ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada penulis akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Sehubungan dengan selesainya penulis proposal ini maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

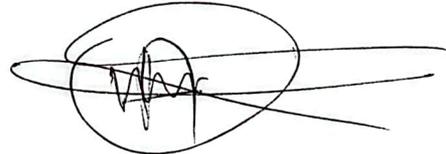
1. Bapak Dr. Rustamajih, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
2. Bapak Roni Andri Pranita, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Fabio Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
3. Ibu Ernawati Simatupang, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Bahasa, Sosial dan Olahraga Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
4. Bapak Dr. Budi Santoso, M.Pd. selaku Pembimbing I Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Dan Bapak Ihsan, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis dan menyusun Skripsi ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bertambah Ilmunya dan berkah.
5. Bapak Lestari, M.Pd. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan

kewarganegaraan Fakultas Fabio Universitas Pendidikan Muhammadiyah
(UNIMUDA) Sorong

7. Bapak Ruben Orosomna, selaku Kepala Kampung Rawara yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Kebersamaan yang baik dalam pelaksanaan penelitian Kampung Rawara Distrik Moskona selatan Kabupaten Teluk Bintuni
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi berkat dan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yesus Ynag Maha Kuasa,dengan pahala yang berlipat ganda semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua,Amin

Sorong 7.....03., 2025



Anita Orosomna

148720520024

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7
2.2 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan	19
2.3 Kampung.	20
2.4 Partisipasi dalam Pembangunan Kampung	19
2.5 Kerangka Berpikir	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	25
3.3 Informan Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data	30

3.6 Triangulasi Data	31
----------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	33
----------------------------	----

4.2 Pembahasan	36
----------------------	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	43
----------------------	----

5.2 Saran	44
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	47
-----------------------------	-----------

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Kemalasan adalah Faktor Dari Sebuah Kegagalan
Maka Kegagalan Terjadi Karena
Terlalu Banyak Berencana Tapi Sedikit Berpikir.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang Tuaku tercinta, Adik, Kakak, dan Sahabat-sahabat terimakasih atas dukungan doa dan moril selama penulis menempuh pendidikan mulai dari awal sampai pada akhir
2. Bapak Dr. Budi Santoso, M.Pd. sebagai pembimbing I Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dan Bapak Ihsan M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengerahkan penulis dalam menulis dan penyusunan Skripsi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bertambah ilmunya dan berkah
3. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkah dan rahmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan proposal ini tepat pada waktu.

Proposal yang berjudul: “Keterlibatan Warga dalam Pengembangan Kelurahan Klasaman: Perspektif Civic Participation” ini disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk menyelesaikan perkuliahan guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Dalam menyusun Proposal ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada penulis akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Sehubungan dengan selesainya penulis proposal ini maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rustamajih, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
2. Bapak Roni Andri Pranita, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Fabio Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
3. Ibu Ernawati Simatupang, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Bahasa, Sosial dan Olahraga Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
4. Bapak Dr. Budi Santoso, M.Pd. selaku Pembimbing I Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Dan Bapak Ihsan, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis dan menyusun Skripsi ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bertambah Ilmunya dan berkah.
5. Bapak Lestari, M.Pd. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Fabio Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

7. Bapak Ruben Orosomna, selaku Kepala Kampung Rawara yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Kebersamaan yang baik dalam pelaksanaan penelitian Kampung Rawara Distrik Moskona selatan Kabupaten Teluk Bintuni
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi berkat dan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yesus Ynag Maha Kuasa,dengan pahala yang berlipat ganda semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua,Amin

Sorong, 2025

Anita Orosomna

148720520024

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANITA OROSOMNA

NIM : 14870520024

Judul : Keterlibatan Warga dalam Pengembangan Kelurahan Klasaman: Perspektif *Civic Participation*

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
				II
1	11/1/2025	Laporan Hasil Penelitian	Hasil temuan di tambah lagi karena masih kurang mendalami	
2	14/1/2025	Tambahan Data	Data sudah bisa di olah ke bab IV	
3	26/1/2025	Bab IV	Perbaiki tulisan hasil temuan dan profil tempat penelitian	
4	30/1/2025	BAB IV	Acc bab IV, Lanjut ke BAB V	
5	10/2/2025	BAB V	BAB V Acc, lanjut ke lampiran	
6	11/2/2025	Lampiran	Lampiran dan abstrak di Acc	

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANITA OROSOMNA

NIM : 14870520024

Judul : Keterlibatan Warga dalam Pengembangan Kelurahan Klasaman: Perspektif *Civic Participation*

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
				I
1				
2				
3				
4				
5				
6				

LEMBAR PERSETUJUAN

**KETERLIBATAN WARGA DALAM PENGEMBANGAN KELURAHAN
KLASAMAN: PERSPEKTIF *CIVIC PARTICIPATION***

ANITA OROSOMNA

148720520024

Telah di setujui tim pembimbing

Pada.....

Pembimbing I

Dr. Budi Santoso, M.Pd.

NIDN 1406029201

.....

Pembimbing II

Ihsan, S. Pd., M. Pd.

NIDN 1419108901

.....

ABSTRAK

Anita Orosomna/148720520024. Keterlibatan Warga dalam Pengembangan Kampung (Studi Kasus di Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong). Skripsi. Fakultas Bahasa Sosial dan Olahraga. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Februari, 2015. **Dr. Budi Santoso, M.Pd., dan Ihsan, S.Pd., M.Pd.**

Tujuan dari Penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan suatu daerah, termasuk di Distrik Klasaman, Kota Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, faktor penghambat partisipasi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan warga. Berdasarkan metode kualitatif yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, ditemukan bahwa tingkat partisipasi warga dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbang) masih rendah, dengan hanya sekitar 30% warga yang hadir dan sebagian besar bersikap pasif. Faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan, minimnya sosialisasi dari pemerintah, serta hambatan ekonomi yang membatasi kesempatan warga untuk terlibat aktif. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan berbasis budaya dan adat lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan warga dibandingkan dengan sistem birokrasi formal. Masyarakat lebih percaya pada keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat daripada Musrenbang yang dianggap kurang inklusif. Partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan juga masih rendah, karena mereka jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis dan lebih sering hanya dilibatkan dalam pekerjaan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana distrik, mengintegrasikan mekanisme adat dalam proses perencanaan pembangunan, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dan pemuda untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi dan perubahan format Musrenbang agar lebih interaktif juga diperlukan. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak yang lebih positif bagi kemajuan Distrik Klasaman.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, pembangunan distrik, Musrenbang, transparansi, budaya lokal

ABSTRACT

Anita Orosomna/148720520024. *Community Engagement in Village Development (Case Study in Klasaman Subdistrict, East Sorong District, Sorong City)*. Undergraduate Thesis. Faculty of Social and Sports Sciences, Muhammadiyah University of Sorong. February 2015. Dr. Budi Santoso, M.Pd., and Ihsan, S.Pd., M.Pd.

Community participation in development is a key factor in the success of a region, including in Klasaman District, Sorong City. This study aims to analyze the level of community involvement in the development planning process, identify factors that hinder participation, and propose strategies to enhance citizen engagement. Using a qualitative research approach involving interviews, observations, and document analysis, the study found that community participation in the *Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan* (Musrenbang) remains low, with only about 30% of residents attending and most being passive participants. The primary barriers to participation include a lack of transparency in development fund management, limited government outreach, and economic constraints that restrict citizens' opportunities for active involvement. Additionally, the study found that culturally and traditionally rooted approaches are more effective in increasing community engagement than formal bureaucratic systems. Residents tend to trust decisions made through traditional deliberations (*musyawarah adat*) rather than Musrenbang, which is perceived as less inclusive. The participation of women and youth in development also remains low, as they are rarely involved in strategic decision-making and are more often engaged in physical labor. To improve community participation, this study recommends several strategies, including enhancing transparency in district fund management, integrating traditional mechanisms into the development planning process, and providing greater opportunities for women and youth to contribute to decision-making. Moreover, an economic empowerment-based approach and a more interactive Musrenbang format are necessary. By implementing these strategies, community engagement in development is expected to increase significantly, leading to more positive impacts on the progress of Klasaman District.

Keywords: Community participation, district development, Musrenbang, transparency, local culture.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Partisipasi masyarakat menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, karena memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat sangat menentukan efektivitas suatu perencanaan, sebab tanpa keterlibatan mereka, pembangunan tidak akan berjalan dengan optimal. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan tidak hanya dalam pelaksanaan program, tetapi juga dalam tahap perencanaan agar setiap program yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam konteks ini, penelitian ini mengangkat tema "Keterlibatan Warga dalam Pengembangan Kampung Rawara Kelurahan Klablim, Kota Sorong."

Perencanaan partisipatif adalah pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemecahan masalah guna mencapai kondisi yang diinginkan. Partisipasi ini mencakup keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi pembangunan. Salah satu forum penting dalam perencanaan partisipatif adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang diselenggarakan oleh pemerintah distrik bekerja sama dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang bertujuan untuk membangun kesepakatan mengenai prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia, baik dari dalam maupun luar distrik.

Keberadaan kebijakan Musrenbang menuntut lembaga-lembaga terkait untuk berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah Kampung Rawara Kelurahan Klablim, lembaga teknis daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan hadir secara langsung dalam forum ini. Kehadiran mereka menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat, mendiskusikan usulan program, serta merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Ketentuan terkait penyelenggaraan pemerintahan distrik mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk pemerintahan yang diatur dalam undang-undang. Prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan di tingkat distrik. Selain itu, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 menetapkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Distrik (RKP-Distrik) adalah dokumen perencanaan tahunan yang mengacu pada program prioritas pembangunan.

Masyarakat berperan penting dalam proses Musrenbang, karena pembangunan yang berjalan tanpa partisipasi warga sering kali gagal mencapai sasaran. Menurut Soekanto (2014), masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di Kampung Rawara Kelurahan Klablim sangat bergantung pada keterlibatan warga dalam seluruh tahapan perencanaan dan implementasi.

Terdapat tiga alasan utama yang menjadikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting:

1. Partisipasi sebagai alat untuk memperoleh informasi. Tanpa keterlibatan warga, pemerintah akan kesulitan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan. Warga yang terlibat dalam perencanaan akan merasa memiliki proyek tersebut, sehingga lebih mendukung dan menjaga keberlangsungannya.
3. Sebagai hak demokrasi masyarakat. Setiap warga berhak menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Partisipasi masyarakat juga membawa manfaat bagi pemerintah. Dengan keterlibatan warga, tenaga dan biaya pembangunan dapat lebih efisien, karena masyarakat turut berkontribusi dalam berbagai aspek pelaksanaan program. Selain itu, partisipasi warga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, memperkuat hubungan sosial, serta memastikan keberlanjutan proyek pembangunan.

Sebaliknya, jika pembangunan dilakukan tanpa partisipasi masyarakat, maka dampak negatifnya bisa sangat besar. Beberapa di antaranya adalah:

1. Pemerintah daerah kehilangan petunjuk mengenai prioritas kebutuhan masyarakat.
2. Investasi pembangunan tidak mencerminkan kebutuhan lokal.
3. Sumber daya yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
4. Infrastruktur yang dibangun tidak tepat guna atau kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Rawara Kelurahan Klabilim, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan strategis. Pemerintah

perlu memberikan ruang bagi perempuan dan pemuda untuk turut serta dalam pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan peran tokoh adat dalam musyawarah pembangunan. Selain itu, mekanisme transparansi dalam pengelolaan dana distrik harus diperbaiki agar masyarakat memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap pemerintah setempat.

Menurut Afrizal et al. (2019), pembangunan harus dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Murdani et al. (2019) juga menekankan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

Dalam pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi, terdapat dua jenis keterlibatan masyarakat: partisipasi pikiran dan partisipasi tenaga. Partisipasi pikiran meliputi sumbangan ide dan gagasan yang dapat digunakan untuk menyusun atau menyempurnakan program pembangunan. Sementara itu, partisipasi tenaga mencakup keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek, seperti gotong royong dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut Adi Sasmita (2015:37), keberhasilan program pembangunan di tingkat lokal bergantung pada partisipasi masyarakat yang tinggi. Pemerintah distrik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung keterlibatan warga, baik melalui pemberian informasi yang jelas, membangun komunikasi yang baik, maupun memastikan bahwa setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah Kampung Rawara Kelurahan Klablim perlu terus mendorong partisipasi aktif

masyarakat dalam setiap aspek pembangunan. Melalui mekanisme yang lebih terbuka dan inklusif, program pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga distrik.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Keterlibatan Warga Dalam Pengembangan Kampung (studi kasus di Kampung Rawara Kelurahan Klablim Distrik Sorong Timur, Kota Sorong)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1. Bagaimana gambaran masyarakat dalam pembangunan di Kampung Rawara Kelurahan Klablim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di wilayah tersebut.
3. Solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar lebih optimal dan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini:

1. untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Rawara Kelurahan Klablim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

2. untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya dalam forum Musrenbang.
3. Untuk mendapatkan Solusi untuk mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Dengan memahami hambatan-hambatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan analisis dalam memahami berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lapangan.

1. Bagi Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian akademik terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
2. Bagi pemerintah Kampung Rawara Kelurahan Klalim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam perumusan kebijakan serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga kesejahteraan warga dapat lebih terjamin dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Partisipasi Masyarakat

A. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dalam pembangunan di suatu wilayah (Ningsih & Ma'ruf, 2023). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan adalah dilibatkannya masyarakat dalam proses pembangunan serta memanfaatkan hasil pembangunan itu sehingga memperoleh nilai gunanya.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang mereka bergabung dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk menyumbang uang, pikiran dan tenaga menyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan dari setiap upaya pembangunan. Partisipasi masyarakat sendiri sangat perlu diaplikasikan dan dijalankan agar nantinya sebuah kebijakan publik yang dibuat akan tepat sasaran sesuai dengan yang dikehendaki (Nawang Sari et al., 2021). Dalam pembangunan di kelurahan, partisipasi masyarakat adalah salah satu elemen yang penting.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Yadav (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013) memaparkan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilihat dalam 4 tahapan kegiatan, yaitu 1). Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3). Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, 4). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Seperti dimaklumi dalam kegiatan atau aktivitasnya tujuan masyarakat yang mulia, baru akan tercapai apabila ada partisipasi anggotanya, sebab dalam partisipasi terdiri atas:

1. Partisipasi dapat dipaksakan dan dapat pula suka rela.
2. Partisipasi dapat formal dan informal.
3. Partisipasi dapat bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sinamo (2022) yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan haruslah dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan unsur-unsur masyarakat dengan tujuan agar rencana pembangunan yang dihasilkan pemerintah menjadi selaras

Ada beberapa aspek penting dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Aspek penting dalam rangka partisipasi ada empat aspek yaitu:

1. Terlibat dan ikut sertanya tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik sesuai Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses yang berencana.
4. Adanya perumusan dan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana.

Berkaitan dengan beberapa pendapat seperti di atas, maka apapun upaya yang dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah beberapa syarat agar masyarakat dapat melaksanakan partisipasi tersebut.

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyansih, 2014:90). Masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Masyarakat setempat merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta mereka lebih terikat dengan tempat. unsur atau ciri-ciri masyarakat terdiri dari 5 yaitu:

- 1) Kelompok manusia
- 2) Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama
- 3) Adanya pertahanan dan kekekalan diri
- 4) Adanya kesinambungan
- 5) Adanya hubungan yang pelik diantara anggotanya.

Karakteristik dari masyarakat itu adalah adanya sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan manusia menurut sejenisnya yang berhubungan satu sama lain secara berkesinambungan masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. mengatakan bahwa unsur-unsur masyarakat ada 4 yaitu :

- 1) Manusia hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada.
- 2) Bercampur untuk waktu yang lama
- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- 4) Mereka merupakan suatu system hidup bersama

B. Proses Partisipasi Masyarakat

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Hal ini penting guna mematangkan apakah program yang direncanakan telah dianalisis secara cermat dan mendalam tentang kondisi social budaya dan alam setempat sehingga program-program tersebut benar-benar menyentuh kepentingan kebutuhan dan menjawab permasalahan masyarakat. Sosialisasi ini penting tahapan-tahapan

peran aktif masyarakat terlaksana secara efektif. Proses partisipasi atau peran aktif masyarakat meliputi empat tahapan yaitu:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (perencanaan)
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan
4. Partisipasi dalam evaluasi
5. Partisipasi Terhadap Lembaga Adat
6. Partisipasi Terhadap Kegiatan KNPI
7. Partisipasi Terhadap Sesama umat beragama

Tahap pertama yaitu tahap pembuatan keputusan (perencanaan) mempunyai landasan filosofi bahwa orang akan merasa dihargai jika mereka diajak untuk berkompromi, memberikan pemikiran-pemikiran dalam membuat suatu keputusan untuk membangun diri, lingkungan, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah. Keikutsertaan anggota/masyarakat didalam pengambilan keputusan secara psikososial telah memaksa anggota masyarakat yang bersangkutan untuk turut ikut bertanggungjawab dalam melaksanakan, mengamankan setiap paket program yang dikomunikasikan. Masyarakat merasa memiliki serta bertanggung jawab secara penuh atas keberhasilan program yang dilaksanakan.

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, memiliki landasan filosofi bahwa tujuan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan adalah agar masyarakat mengetahui secara baik tentang cara-cara melaksanakan program sehingga nantinya mereka dapat secara mandiri mampu melanjutkan, meningkatkan serta melestarikan program pembangunan yang

dilaksanakan Tahap ketiga yaitu tahap pemanfaatan hasil, artinya tahapan ini lebih menekankan pada pemanfaatan program pembangunan yang diberikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat diwilayah yang bersangkutan.

Tahapan keempat yaitu tahapan dalam evaluasi, masyarakat diarahkan untuk mampu menilai sendiri dengan mengungkapkan tentang apa yang mereka tahu dan lihat. Mereka diberi kebebasan untuk menilai sesuai yang ada didalam benaknya, pengalaman, kelebihan dan kekurangan dari program, kelemahannya, manfaat, hambatan, factor pelancar yang mereka hadapi dalam operasionalisasi program dan secara bersama-sama mencari alternative terbaik sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan di waktu yang akan datang.

Tahapan kelima yaitu tahapan dalam Lembaga Adat Masyarakat diarahkan bagaimana untuk berperan atau parsipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Adat tersebut, contoh pembayaran maskawin, Pembayaran Asuransi jiwa atau orang meninggal.

Tahapan keenam yaitu tahapan dalam KNPI Masyarakat diarahkan untuk ikut partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh KNPI, contoh dalam rangka ulang tahun KNPI, hari Sumpah Pemuda, dan memperingati 17 Agustus maka masyarakat diharapkan ikut partisipasi Tahapan ketujuh yaitu tahapan dalam umat beragama yaitu Masyarakat diarahkan untuk saling menghormati, saling membantu sesama umat

Pendapat diatas menjadi acuan penetapan indikator dalam penelitian factor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, namun tidak sepenuhnya digunakan sebagai indicator partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat factor penghambat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa sehingga untuk pemanfaatan tidak digunakan sebagai indicator, sedangkan untuk partisipasi dan evaluasi pembangunan dapat digantikan partisipasi dalam pengawasan, sebab prinsip evaluasi dalam suatu proses terkait erat dengan pengawasan.

C. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental atau emosi serta fisik seseorang dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung dalam mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Dari hal tersebut mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang baik
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
5. Memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan.
2. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak) Misalnya partisipasi buah pikiran, partisipasi social, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usahausaha untuk pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja dan perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

Sedangkan partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan untuk mewujudkannya. Misalnya arisan, menghadiri acara duka, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama, sedangkan partisipasi representative dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan atau mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau kepanitiaan.

D. Manfaat Partisipasi Masyarakat

- 1) Bahwa partisipasi akan memberikan manfaat yang penting bagi keberhasilan organisasi yaitu: Lebih menginginkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya sumbangan yang berarti dan positif.
- 2) Mengedepankan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan maupun atasan memiliki kesempatan bersama dalam mengajukan pemikiran.

- 3) Mendorong kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan bersama
- 4) Melatih dan bertanggung jawab serta mendorong untuk membangun kepentingan bersama
- 5) Memungkinkan untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi.

E. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik atau pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan budaya itu baru akan berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negara. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih,2014:92).

Widjojo Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

- 1) Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam perumusan keputusan-keputusan atau alternative-alternatif yang didukung pada fakta-fakta dan data-data sebagai bahan untuk melakukan suatu aktifitas atau kegiatan dalam masyarakat secara material (fisik) dan spriritual dan mental (non-fisik) untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik (Mukmin, 2017:3).

Perencanaan strategis dianggap penting untuk menciptakan nilai publik, yang melibatkan peningkatan kualitas hidup dan memastikan manfaat berkelanjutan dari institusi publik dalam menghadapPerencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua asapek , yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyangsih,2014:90) masa depan yang tidak pasti (Bryson, 2018).

Riyadi (2018:4) pembangunan, yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui uapaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Kunarjo (2019:34) tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah.

Dari berbagai defenisi pembangunan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah perubahan, maksudnya mengubah sesuatu yang ada supaya bisa menjadi lebih baik lagi, dan juga membuat sesuatu yang belum ada supaya bisa menjadi lebih baik lagi, dan juga membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada. Pembangunan juga dimaksud pertumbuhan, yang dilakukan secara sadar, rencana yang tersusun rapi, dan cita-

cita akhir dari perjuangan bangsa dan Negara. Pembangunan desa adalah suatu proses dengan nama usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

Visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan merupakan perubahan yang disengajakan atau perubahan yang direncanakan secara sistematis, komprehensif (terpadu) dan menyatu (terintegrasi) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pembangunan berarti suatu proses rekayasa social maupun teknis yang dimaksudkan sebagai tindakan interventif untuk mengatasi masalah dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Mengutip jurnal Lentera, Ida Suryani Wijaya (2015: 55), pembangunan merupakan proses perubahan menuju kondisi lebih baik dalam masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan kesejahteraan.

2.2 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan social. “Ditinjau dari segi istilah sebenarnya pembangunan desa atau Kampung identik dengan pembangunan masyarakat Kampung. Bahwa sejak lahirnya istilah pembangunan masyarakat bahwa mempunyai kedudukan internasional dan mempunyai latar belakang

historis, sosial, ekonomi, cultural, dan spiritual”. Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan.

Jumlah penduduk yang besar pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan disuatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. karena dari penduduk berkualitas itu lah memungkinkan untuk bisa mengolah potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien dan maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat luas suatu bangsa secara terus menerus dan dalam waktu yang mencakup antargenerasi berkelanjutan pembangunan menunjuk pada kemampuan untuk tumbuh dan berubah terus menerus agar masyarakat menikmati kesejahteraan sekurang kurangnya sama dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi.

Dari pengertian pembangunan berkelanjutan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang dan tetap menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga karena kelestarian lingkungan yang tidak di jaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan akan hilang.

2.3 Pengertian Kampung

Pengertian desa sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Desa. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasar dari tindakan yang dilakukan masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampung adalah tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur, yang menunjuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas,

Menurut R. Bintarto (Dalam Fairus Adira, 2020), Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.

2.4 Partisipasi dalam Pembangunan Kampung

A. Perencanaan Partisipasi Pembangunan

Dalam kamus management karangan Moekijat menyebutkan ada beberapa pengertian perencanaan yaitu bahwa “perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan duga-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.”.

Perencanaan pembangunan di Indonesia dikenal dengan jenis top-down dan booton-up planning, vertical dan horizontal planning, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat

secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Uraian tersebut masing-masing jenis itu di urutkan sebagai berikut:

1. Perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi
2. Perencanaan alokatif dan perencanaan inivatif
3. Perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal
4. Perencanaan bertujuan jelas dan perencanaan bertujuan *laten*
5. Perencanaan indikatif dan perencanaan *imperative*
6. Top-down dan *botton up planning*
7. Vertical dan horizontal *planning*
8. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung”

Pembangunan Kampung harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan mencerminkan segala potensi yang dimiliki oleh Kampung dan harus merupakan titik temu antara program dari atas dan program dari bawah, artinya bahwa pembangunan Kampung tidak lepas dari pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang meliputi pendekatan *top-down* dan *botton up*, diatas kertas nampaknya akan menjamin keseimbangan prioritas nasional dengan aspirasi *local* dalam perencanaan pembangunan daerah. namun kenyataannya banyak daerah belum sepenuhnya mengkomodasi aspirasi local telah tersingkir dalam rapat koordinasi, karena proposal yang diajukan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tigggi menjadi prioritas yang paling utama, tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh pemerintahan yang tingkatnya rendah. “

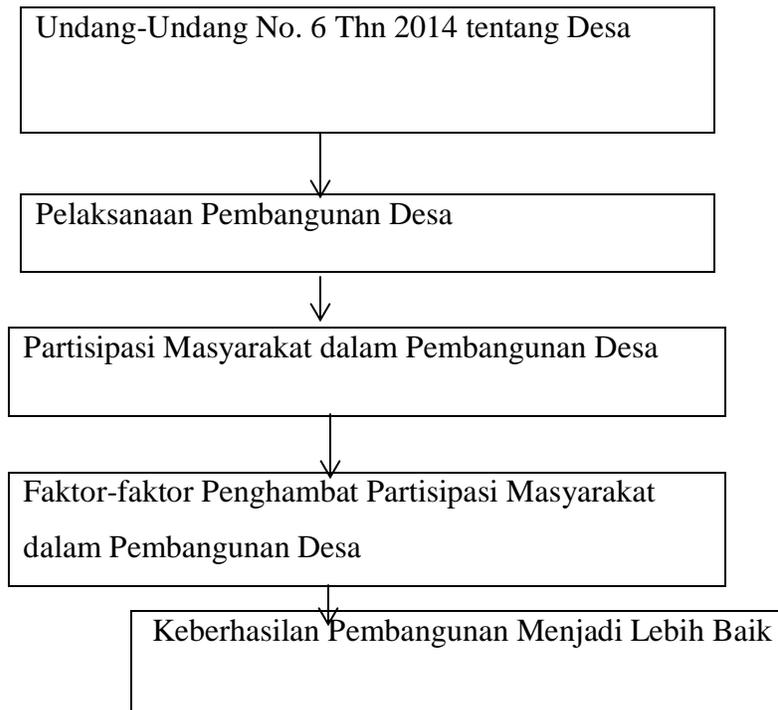
Dalam implementasi perencanaan daerah, ternyata banyak masalah yang muncul. permasalahan lain yang sering muncul dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Propenas dan propeda bukanlah rencana yang kontinu sebab hanya dipersiapkan lima tahun sekali. Seperti halnya dengan poldas, perencanaan tersebut tidak menjelaskan out-put dan hasil serta tidak berhubungan dengan anggaran, kendati defenisinya secara umum sebagai progam pembangunan.
2. Masih belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana dan kapan perencanaan terintegrasi.
3. Perencanaan dilapangan menunjukkan kesenjangan yang besar dalam memperhitungkan kemampuan financial
4. Perencanaan tersebut selalu memfokuskan dari pada anggaran dan proyek pembangunan dari pada memandang anggaran secara keseluruhan”.

2.5 Kerangka Berfikir

Menurut Sugyono, kerangka berfikir merupakan “model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Untuk itu penulis menggunakan kerangka berfikir dalam penelitian ini seperti gambar dibawah:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian. Metode juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan peran Kepala Kampung serta Masyarakat dalam Keterlibatan warga dalam pengembangan Kampung Rawara Kelurahan Klablim. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu yang di gunakan sejak tanggal dikeluarkan ijin penelitian sampai selesainya
2. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Kantor Kampung Rawara Kelurahan Klablim Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif ini tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan penelitian adalah implementor dari kebijakan yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari:

- 1) Informan Kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti.
- 2) Informan Utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti.
- 3) Informan Tambahan, merupakan mereka yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2018:224):

- 1) Observasi, mencari data dan mengumpulkannya dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis serta mendatangi langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data tersebut. Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala

Spikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Mencari data dan mengumpulkanya dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis serta mendatangi langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data tersebut.

- 2) Wawancara, yaitu dengan cara wawancara langsung dengan pihak Aparat Kampung dan juga Masyarakat Kampung guna untuk mendapatkan data yang valid terkait masalah yang akan diteliti.
- 3) Dokumentasi adalah data yang diperoleh secara tertulis dari dokumen-dokumen yang ada dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Selain hasil observasi dan wawancara dokumentasi merupakan hal yang dianggap penting untuk mendapatkan data, melalui dokumen tertulis.

3.5 Instrumen Penelitian

Menurut Purwanto (2018), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian dibuat sesuai tujuan pengukuran dan teori yang digunakan. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data penelitian, tujuan dilakukannya hal ini karena diharapkan penelitian mampu menghasilkan sesuatu yang diharapkan, bisa berupa data empiris.

Instrumen Wawancara

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Sumber Data	Teknik/ Instrumen Penelitian
----	-----------------	------------	-------------	------------------------------------

1	Bagaimana gambaran masyarakat dalam pembanguna?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana startegi atau gagasan dari pemerintah Kampung untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program? 3. Apakah Kepala Kampung merasa didukung oleh masyarakat dalam penggunaan? 4. Bagaimana gambaran Kepala Kampung untuk membangun? 	Kepala Kampung	Pedoman Wawancara
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah peran masyarakat dalam pembangunan di Kampung? 2. Bagaimana dampak dari pelaksanaan pembangunan yang dirasakan masyarakat? 3. Apakah Masyarakat kampung terlibat aktif dalam rapat atau penetapan anggran Kampung? 4. Apakah Masyarakat Kampung terlibat dalam pengambilan keputusan program-program Kampung? 		Pedoman Observasi

2	Apa saja faktor-faktor penghambat partisipasi dalam penyelenggaraan Musyawarah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah MusKam masyarakat dilibatkan? 2. Apakah partisipasi Masyarakat terhadap MusKam? 3. Apa faktor penghambat MusKam? 4. Apakah MusKam membantu masyarakat? 	Kepala Suku	Pedoman Wawancara
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Kepala Kampung mengundang warga dalam MusKam? 2. Apa dampak positif diadakan MusKam? 3. Bagaimana MusKam membantu warga dalam Program-program? 		Pedoman Observasi
3	Apa solusi untuk mengatur hambatan partisipasi Masyarakat?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana partisipasi masyarakat? 2. Bagaimana solusi Masyarakat Kampung Rawara agar bisa berpartisipasi? 3. Bagaimana sosialisasi Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Program Pemerintah? 	Kepala Distrik	Pedoman wawancara

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana solusi Masyarakat kepada Pemerintah agar hambatan partisipasi tidak terjadi? 2. Bagaimana tindakan Kepala Kampung dalam mengatasi masalah atau hambatan? 3. Apakah dalam program pembangunan Kepala Kampung melibatkan Masyarakat? 		Pedoman Observasi
--	--	---	--	-------------------

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1) Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dilapangan dicatat dalam bentuk naratif yaitu uraian data yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan kedalam catatan kecil. Dari catatan deskriptif ini, kemudian dibuat catatan yang berisi komentar, pendapat, penafsiran, peneliti dan fenomena yang ditemui dilapangan.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang ditemukan dilapangan berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data (informan).

3) Penyajian Data

Tahap ini disajikan data hasil temuan dilapangan dalam bentuk teks deskriptif naratif.

3.7 Triangulasi Data

Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama

menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3) Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterlibatan warga dalam pengembangan Kampung Rawara Kelurahan Klablim, Kota Sorong, dengan menggali informasi melalui wawancara, observasi langsung, serta analisis dokumen terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Emanuel Faidiban, Kepala Kampung Rawara Kelurahan Klablim (12 Januari 2025), partisipasi warga dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Distrik (Musrenbang) masih sangat rendah, dengan tingkat kehadiran hanya 30% dari total warga distrik. Warga cenderung kurang aktif dalam menyampaikan pendapat, dan sebagian besar hanya mendengarkan tanpa memberikan masukan yang berarti. Yosep Duwit, Sekretaris Kampung Rawara Kelurahan Klablim (15 Januari 2025), menambahkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah distrik. Warga merasa tidak memiliki akses informasi yang cukup terkait rencana pembangunan, sehingga mereka tidak melihat pentingnya ikut serta dalam Musrenbang.

Hasil observasi pada 12 Januari 2025 mendukung pernyataan tersebut, di mana kehadiran warga dalam Musrenbang lebih didominasi oleh laki-laki dewasa, sementara perempuan dan pemuda hampir tidak terlihat dalam diskusi yang berlangsung. Situasi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa dokumentasi resmi Musrenbang distrik menunjukkan minimnya usulan dari masyarakat yang benar-benar diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Hal ini senada dengan pernyataan Martinus Asso, Ketua Badan

Permusyawaratan Distrik (BPD) (18 Januari 2025), yang mengakui bahwa sistem Musrenbang saat ini kurang menarik bagi warga. Ia mengusulkan agar pertemuan lebih bersifat informal dan dilakukan dalam skala kecil, seperti diskusi kelompok yang melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan.

Dari sisi adat dan budaya, wawancara dengan Elias Kbarek, Ketua Lembaga Adat Kampung Rawara Kelurahan Klablim (22 Januari 2025), mengungkapkan bahwa musyawarah adat jauh lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan Musrenbang formal. Menurutnya, jika pemerintah ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, mereka harus memasukkan unsur adat dalam proses pengambilan keputusan, karena warga lebih percaya terhadap tokoh adat dibandingkan dengan aparat pemerintahan distrik. Observasi yang dilakukan dalam beberapa pertemuan adat juga membuktikan bahwa tingkat kehadiran masyarakat lebih tinggi dibandingkan saat Musrenbang, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis adat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan distrik.

Selain faktor transparansi dan budaya, faktor ekonomi juga menjadi penghambat utama partisipasi masyarakat. Maria Imbiri, perwakilan kelompok perempuan Kampung Rawara Kelurahan Klablim (28 Januari 2024), menyampaikan bahwa banyak perempuan yang tidak dapat berpartisipasi dalam Musrenbang karena mereka lebih sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi pada gotong royong pembangunan jalan distrik yang dilakukan pada 20 Januari 2024, di mana partisipasi warga dalam kerja bakti jauh lebih tinggi dibandingkan dalam pertemuan resmi. Sekitar 80 orang hadir dan bekerja secara sukarela, menunjukkan bahwa masyarakat

lebih memilih partisipasi dalam bentuk kerja nyata dibandingkan dengan diskusi atau rapat. Meskipun demikian, dalam gotong royong ini, perempuan lebih banyak berperan dalam penyediaan konsumsi dan logistik, sedangkan laki-laki lebih dominan dalam pekerjaan fisik.

Dari perspektif pemuda, Yohanes Fonataba, perwakilan kelompok pemuda distrik (1 Februari 2025), menyoroti bahwa banyak pemuda yang sebenarnya ingin ikut serta dalam pembangunan distrik, tetapi mereka merasa tidak diberikan ruang yang cukup untuk berkontribusi. Mereka lebih sering dilibatkan dalam pekerjaan fisik daripada dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga diperkuat oleh dokumen Musrenbang yang menunjukkan bahwa hampir tidak ada usulan dari pemuda yang masuk dalam program prioritas pembangunan distrik. Akibatnya, banyak pemuda yang merasa tidak memiliki peran penting dalam pembangunan dan lebih memilih untuk tetap pasif.

Masalah transparansi juga menjadi faktor utama dalam rendahnya partisipasi masyarakat. Wawancara dengan Pendeta Markus Yeboa, tokoh agama di Kampung Rawara Kelurahan Klalim (25 Januari 2025), mengungkapkan bahwa masyarakat masih merasa ragu dengan pengelolaan dana pembangunan. Menurutnya, pemerintah distrik perlu lebih terbuka dalam menjelaskan anggaran dan alokasi pembangunan, misalnya dengan menyampaikan laporan keuangan di tempat-tempat umum seperti rumah ibadah atau melalui pertemuan warga. Observasi yang dilakukan pada 25 Januari 2024 mendukung pernyataan tersebut, di mana informasi terkait penggunaan dana distrik hanya ditempel di kantor distrik dan tidak ada pertemuan khusus untuk menjelaskannya kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian besar warga tetap tidak memahami bagaimana anggaran distrik digunakan.

Triangulasi data yang dilakukan dengan membandingkan wawancara, observasi, dan dokumen resmi menunjukkan pola yang konsisten: rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya transparansi, minimnya sosialisasi, serta faktor ekonomi yang membatasi keterlibatan mereka dalam pembangunan. Warga lebih cenderung terlibat dalam kerja bakti atau gotong royong dibandingkan dengan perencanaan pembangunan. Selain itu, tokoh adat lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan aparat distrik, yang menunjukkan perlunya pendekatan berbasis budaya untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana distrik, penggunaan musyawarah adat sebagai sarana perencanaan pembangunan, serta penyediaan program pemberdayaan ekonomi bagi warga. Jika pemerintah distrik dapat mengintegrasikan unsur-unsur ini dalam kebijakan mereka, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Rawara Kelurahan Klalim, Kota Sorong dapat meningkat secara signifikan di masa depan.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Rawara Kelurahan Klalim, Kota Sorong, masih rendah. Penyebab utamanya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana distrik, minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, serta faktor ekonomi yang membatasi keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan. Hasil ini selaras dengan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

1. Rendahnya Partisipasi dalam Musrenbang dan Faktor Penyebabnya

Musyawarah Rencana Pembangunan Distrik (Musrenbang) merupakan wadah utama bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi terkait pembangunan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa hanya sekitar 30% warga yang hadir dalam Musrenbang, dan mereka yang hadir cenderung pasif. Hasil observasi menunjukkan bahwa kehadiran lebih didominasi oleh laki-laki dewasa, sementara perempuan dan pemuda hampir tidak terlibat. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidaksetaraan akses informasi dan kurangnya ruang bagi kelompok rentan masih menjadi tantangan dalam sistem perencanaan pembangunan.

Fenomena ini sejalan dengan pendapat Arnstein (2015) dalam teorinya tentang "Ladder of Citizen Participation", yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat tokenisme, di mana masyarakat hanya diberi kesempatan untuk hadir tanpa benar-benar memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Musrenbang yang tidak inklusif membuat keterlibatan masyarakat menjadi sekadar formalitas tanpa memberikan dampak nyata terhadap kebijakan yang dihasilkan. Sen (2016) juga menambahkan bahwa demokrasi partisipatif harus diiringi dengan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengakses informasi, sehingga tidak hanya sekadar menghadiri rapat, tetapi juga mampu memberikan usulan yang berbobot.

2. Pengaruh Transparansi dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan distrik menjadi faktor utama yang membuat masyarakat enggan berpartisipasi. Pendeta Markus Yeboa dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa banyak warga yang merasa ragu terhadap penggunaan anggaran, karena informasi terkait dana desa

hanya ditempel di kantor distrik tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Hal ini selaras dengan penelitian Fung (2015) yang menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah yang tidak transparan cenderung akan menghadapi resistensi dari warganya, karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Selain itu, Putnam (2016) dalam studinya tentang modal sosial dan kepercayaan dalam pemerintahan lokal, menyatakan bahwa partisipasi warga dalam pembangunan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah setempat. Jika masyarakat merasa bahwa dana pembangunan tidak dikelola dengan baik atau tidak digunakan untuk kepentingan bersama, maka mereka cenderung menjadi apatis dan memilih untuk tidak terlibat dalam Musrenbang atau forum-forum pembangunan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya strategi transparansi yang lebih baik, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempublikasikan anggaran secara terbuka, atau penyelenggaraan diskusi publik yang lebih partisipatif.

3. Peran Budaya dan Adat dalam Partisipasi Masyarakat

Temuan lain dalam penelitian ini adalah warga Kampung Rawara Kelurahan Klablim lebih aktif dalam musyawarah adat dibandingkan dengan Musrenbang formal. Elias Kbarek, Ketua Lembaga Adat Kampung Rawara Kelurahan Klablim, menyatakan bahwa masyarakat lebih mempercayai keputusan yang dibuat melalui mekanisme adat dibandingkan keputusan yang diambil oleh pemerintah distrik. Observasi yang dilakukan dalam pertemuan adat juga menunjukkan bahwa tingkat kehadiran warga lebih tinggi dibandingkan dalam Musrenbang, yang menunjukkan adanya kepercayaan lebih terhadap struktur sosial tradisional.

Hasil ini didukung oleh Chambers (2017) yang menyatakan bahwa pembangunan berbasis komunitas harus mempertimbangkan aspek budaya dan nilai-nilai lokal untuk meningkatkan partisipasi warga. Menurutnya, pendekatan pembangunan yang terlalu formal dan mengikuti sistem birokrasi modern sering kali gagal mengakomodasi karakteristik sosial masyarakat di wilayah tertentu, terutama di daerah dengan struktur adat yang kuat. Cornwall (2018) juga menekankan bahwa mekanisme partisipatif yang berbasis pada nilai-nilai lokal cenderung lebih efektif dalam mendorong keterlibatan masyarakat dibandingkan dengan mekanisme formal yang didasarkan pada sistem pemerintahan modern.

Oleh karena itu, pemerintah distrik perlu memasukkan unsur adat dalam proses perencanaan pembangunan, misalnya dengan menjadikan musyawarah adat sebagai bagian dari tahapan perencanaan di tingkat distrik. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa lebih dihargai dan lebih tertarik untuk terlibat dalam proses pembangunan.

4. Keterlibatan Perempuan dan Pemuda dalam Pembangunan

Partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan di Kampung Rawara Kelurahan Klablim juga masih tergolong rendah. Hasil wawancara dengan Maria Imbiri, perwakilan kelompok perempuan, menunjukkan bahwa banyak keputusan pembangunan tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak-anak, seperti akses air bersih dan fasilitas kesehatan ibu dan anak. Selain itu, pemuda lebih sering dilibatkan dalam pekerjaan fisik dibandingkan dalam pengambilan keputusan, sebagaimana diungkapkan oleh Yohanes Fonataba, perwakilan kelompok pemuda distrik.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Kabeer (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan perspektif gender cenderung

mengabaikan kebutuhan perempuan dalam perencanaan dan implementasi program. Perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam berpartisipasi karena beban kerja domestik yang tinggi dan kurangnya akses terhadap forum pengambilan keputusan. Hickey dan Mohan (2017) juga menekankan bahwa pemuda sering kali diposisikan sebagai tenaga kerja dalam pembangunan, tetapi jarang diberikan ruang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis.

Untuk meningkatkan partisipasi kelompok ini, pemerintah distrik perlu menerapkan kebijakan afirmatif, seperti menyediakan forum diskusi khusus bagi perempuan dan pemuda, serta memastikan bahwa program pembangunan yang dirancang mencerminkan kepentingan mereka.

5. Partisipasi Warga dalam Gotong Royong dan Potensi Pemberdayaan Ekonomi

Meskipun partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah, hasil penelitian menunjukkan bahwa warga lebih aktif dalam kegiatan gotong royong. Observasi yang dilakukan pada 20 Januari 2024 menunjukkan bahwa sekitar 80 orang hadir dan bekerja dalam pembangunan jalan distrik, menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih keterlibatan dalam bentuk kerja nyata dibandingkan dengan diskusi atau rapat.

Fenomena ini didukung oleh teori Chambers (2018) yang menegaskan bahwa masyarakat di daerah pedesaan dan distrik lebih tertarik pada partisipasi berbasis aksi daripada partisipasi berbasis diskusi. Mereka cenderung lebih suka melihat hasil nyata dari keterlibatan mereka dalam pembangunan dibandingkan hanya sekadar memberikan pendapat dalam rapat. Rifkin (2019) juga menyatakan bahwa partisipasi berbasis

pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan keterlibatan warga secara signifikan, karena memberikan manfaat langsung kepada mereka.

Dengan demikian, strategi peningkatan partisipasi masyarakat di Kampung Rawara Kelurahan Klablim harus lebih fokus pada pemberdayaan berbasis aksi, seperti pelibatan warga dalam proyek infrastruktur kecil, program ekonomi berbasis komunitas, serta skema insentif bagi mereka yang aktif berkontribusi dalam pembangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai teori partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh transparansi, kepercayaan terhadap pemerintah, nilai budaya, serta akses masyarakat terhadap informasi. Untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam pembangunan Kampung Rawara Kelurahan Klablim, perlu dilakukan reformasi dalam sistem transparansi keuangan, integrasi nilai-nilai adat dalam perencanaan pembangunan, serta penyediaan ruang yang lebih besar bagi perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi berbasis aksi perlu lebih dioptimalkan, karena masyarakat lebih cenderung berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka. Dengan strategi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kemajuan distrik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Rawara Kelurahan Klablim, Kota Sorong, dapat disimpulkan bahwa tingkat keterlibatan warga masih tergolong rendah, terutama dalam aspek perencanaan dan pengambilan keputusan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Distrik (Musrenbang). Partisipasi warga hanya sekitar 30%, dengan dominasi laki-laki dewasa, sementara perempuan dan pemuda masih kurang terlibat. Penyebab utama rendahnya partisipasi adalah minimnya transparansi dalam pengelolaan dana distrik, kurangnya sosialisasi dari pemerintah distrik, serta faktor ekonomi yang membatasi waktu dan kesempatan warga untuk aktif dalam Musrenbang. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat lebih tertarik berpartisipasi dalam bentuk kerja nyata, seperti gotong royong dalam pembangunan infrastruktur, dibandingkan dengan menghadiri diskusi atau forum resmi. Hasil observasi menunjukkan bahwa pada kegiatan gotong royong pembangunan jalan distrik, sekitar 80 orang hadir dan bekerja secara sukarela, menunjukkan bahwa keterlibatan warga lebih tinggi dalam aspek fisik dibandingkan administratif.

Selain itu, peran adat dan budaya masih sangat kuat di Kampung Rawara Kelurahan Klablim, di mana masyarakat lebih mempercayai keputusan yang dibuat melalui musyawarah adat dibandingkan dengan sistem pemerintahan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya lebih efektif dalam mendorong partisipasi warga dibandingkan pendekatan birokratis. Faktor ketidaksetaraan akses informasi dan

kesempatan juga berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi kelompok tertentu, seperti perempuan dan pemuda. Perempuan masih terbatas perannya dalam proses pengambilan keputusan, sementara pemuda lebih sering dilibatkan dalam pekerjaan fisik dibandingkan dengan pembuatan kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu adanya perbaikan dalam sistem transparansi, integrasi nilai-nilai adat dalam proses pengambilan keputusan, serta pemberdayaan kelompok yang selama ini kurang dilibatkan. Jika hal ini dilakukan, maka tingkat partisipasi warga dalam pembangunan Kampung Rawara Kelurahan Klabilim dapat meningkat secara signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Rawara Kelurahan Klabilim, Kota Sorong:

1. Meningkatkan Transparansi dan Sosialisasi Pemerintah Distrik

- a) Pemerintah distrik harus lebih aktif dalam menyediakan informasi terkait pembangunan, terutama dalam pengelolaan dana dan prioritas program yang dirancang.
- b) Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui pertemuan terbuka, papan pengumuman di lokasi strategis, media sosial, serta penggunaan teknologi digital seperti website atau grup WhatsApp komunitas.

- c) Pemerintah distrik perlu melakukan diskusi publik rutin yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap kebijakan yang dibuat.

2. Mengoptimalkan Peran Adat dalam Proses Pengambilan Keputusan

- a) Karena masyarakat lebih percaya pada sistem adat, maka musyawarah adat dapat dijadikan bagian dari proses perencanaan pembangunan distrik.
- b) Pemerintah distrik dapat bekerja sama dengan tokoh adat dalam menyusun kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih diterima oleh masyarakat.
- c) Pembangunan berbasis budaya harus diperkuat dengan regulasi yang memungkinkan mekanisme adat berperan aktif dalam sistem pemerintahan lokal.

3. Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dan Pemuda dalam Pembangunan

- a) Pemerintah distrik perlu memastikan bahwa kelompok perempuan memiliki ruang khusus untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam perencanaan pembangunan.
- b) Pemuda harus diberikan kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, bukan hanya dalam aspek tenaga kerja fisik.
- c) Pemberian insentif atau program pelatihan kepemimpinan bagi pemuda dan perempuan dapat meningkatkan minat mereka dalam keterlibatan aktif di tingkat distrik.

4. Mendorong Partisipasi Berbasis Pemberdayaan Ekonomi

- a) Mengingat bahwa faktor ekonomi menjadi penghambat utama keterlibatan warga dalam pembangunan, pemerintah distrik dapat menciptakan program yang menghubungkan pembangunan dengan peningkatan kesejahteraan warga.

- b) Contohnya adalah program padat karya, proyek infrastruktur berbasis komunitas, atau bantuan usaha kecil bagi warga yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan.
- c) Selain itu, pelatihan keterampilan dan akses modal usaha bagi warga dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong mereka agar lebih terlibat dalam pembangunan distrik.

5. Mengubah Format Musrenbang agar Lebih Interaktif dan Partisipatif

- a) Pemerintah distrik dapat mengganti format Musrenbang yang terlalu formal dan kurang menarik dengan diskusi kelompok kecil yang lebih interaktif.
- b) Penggunaan metode "dialog terbuka" atau "forum diskusi komunitas" dapat membuat masyarakat lebih nyaman dalam menyampaikan pendapatnya.
- c) Pemerintah juga dapat menggunakan media visual dan bahasa yang lebih mudah dipahami, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk ikut serta dalam proses perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sasmita. (2015). *Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Afrizal, A., Setiawan, I., & Rahmat, R. (2019). *Pembangunan Berbasis Partisipasi: Pendekatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Akademik.
- Arnstein, S. R. (2015). *A ladder of citizen participation*. *Journal of the American Planning Association*, 85(3), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944363.2015.1034406>
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Chambers, R. (2017). *Rural development: Putting the last first*. Routledge.
- Chambers, R. (2018). *Ideas for development: Reflecting forwards*. Earthscan.
- Cornwall, A. (2018). *Beyond the usual suspects: Strengthening citizen engagement in local governance*. *Development in Practice*, 28(3), 310-321. <https://doi.org/10.1080/09614524.2018.1433412>
- Dahlia, T., & Syafrizal. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(2), 112-126.
- Fung, A. (2015). *Reinventing democracy: Innovations in citizen participation*. *Public Administration Review*, 75(4), 510-522. <https://doi.org/10.1111/puar.12360>
- Hickey, S., & Mohan, G. (2017). *Participation: From tyranny to transformation?*. Zed Books.
- Kabeer, N. (2016). *Gender equality, economic growth, and women's agency: The enabling role of participation*. *Feminist Economics*, 22(2), 29-50. <https://doi.org/10.1080/13545701.2016.1142105>
- Kementerian PUPR. (2018). *Konsep pembangunan kampung berkelanjutan: Studi kasus di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Murdani, A.,

- Sutrisno, B., & Lestari, D. (2019). *Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di Indonesia*. Bandung: Ganesha Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP-Distrik).
- Purwanto, M. (2018). *Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data*. Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial.
- Putnam, R. D. (2016). *Social capital and community development*. *Annual Review of Political Science*, 19(1), 355-378. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050514-125146>
- Rifkin, S. B. (2019). *Health planning and community participation: Case studies from developing countries*. Oxford University Press.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Sen, A. (2016). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo, P. (2015). *Metode penelitian dalam ilmu sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- Wijaya, H. (2018). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yunus, M. (2007). *Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism*. PublicAffairs